

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi ke-31 berdasarkan UU No.27/2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang terbentuk setelah era reformasi terjadi dan terbagi atas tiga daerah, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan UU No.5/2003 Tanggal 23 Januari dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Provinsi tersebut menjadi provinsi sendiri yang berkewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

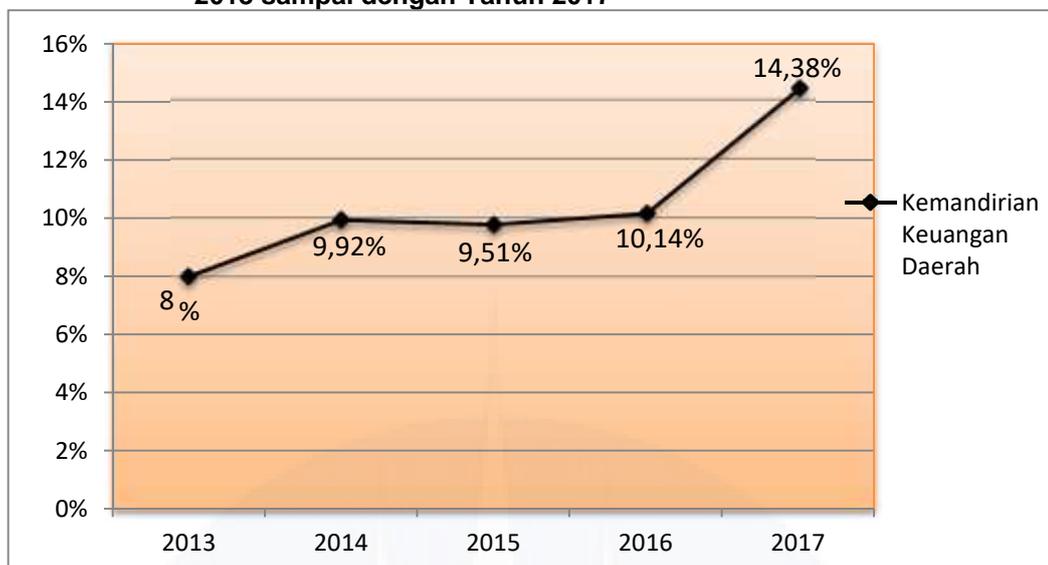
UU No. 32/2004 menjelaskan mengenai otonomi daerah, otonomi daerah merupakan hak wewenang & kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah & kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan undang-undang otonomi daerah ialah untuk menciptakan kemandirian dari masing masing daerah, dan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat, yang sebelumnya harus mengurus pengelolaan setiap daerah (DN, *et al* 2014).

Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi berdasarkan UU No.32/2004. Perbandingan

antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumber lain pendapatan daerah merupakan cara untuk menentukan kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2016).

Kabupaten Bangka Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Bangka Tengah juga merupakan kabupaten pemekaran yang pelaksanaan otonomi daerahnya terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantara kabupaten-kabupaten pemekaran lainnya. Berdasarkan hasil Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (EDOHP) Tahun 2011 Kabupaten Bangka Tengah menduduki peringkat ke-2 terbaik diantara 164 kabupaten pemekaran seluruh Indonesia dengan pelaksanaan otonomi terbaik. Pelaksanaan otonomi yang baik maka daerah diuntut untuk mandiri dan dapat menggali serta mengelola sumber daya yang daerah miliki untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Gambar I.1 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**



Sumber: Laporan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, data diolah (2019)

Berdasarkan Gambar I.1 kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan mengalami kenaikan rasio kurun waktu 5 tahun terakhir. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 10,39 persen pertahun dengan kategori rendah sekali dan termasuk dalam hubungan instruktif. Sehingga dapat dijelaskan, sebesar 89,61 persen kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah masih berasal dari penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah, dan 10,39 persen berasal dari PAD Kabupaten Bangka Tengah.

Menurut UU No. 33/2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, selanjutnya Octoviodo, *et al* (2014) mengemukakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD diantaranya adalah memaksimalkan potensi yang ada &

mengeksplorasi potensi sumber pendapatan baru sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Korengkeng, *et al* (2017) menjelaskan tinggi rendahnya tingkat dependensi pemerintah daerah terhadap pusat dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan PAD. PAD merupakan katalisator untuk mengukur derajat kemandirian suatu daerah. Sumber penerimaan daerah yang signifikan terhadap PAD adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah (Maznawaty, *et al*, 2015)

Kabupaten Bangka Tengah diharapkan dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta mengelolanya demi kelangsungan dan kemajuan daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan pajak daerah dan memaksimalkan PAD dalam rangka kemandirian keuangan daerah. Target dan realisasi PAD Kabupaten Bangka Tengah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 adalah:

**Tabel I.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	Rp. 38.294.800.000	Rp. 41.394.362.993	108,09
2014	Rp. 59.494.539.500	Rp. 61.632.402.924	103,59
2015	Rp. 70.210.681.800	Rp. 66.341.267.136	94,49
2016	Rp. 95.720.023.150	Rp. 73.459.526.744	76,74
2017	Rp.110.990.015.000	Rp. 97.375.136.680	87,73

Sumber Laporan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui bahwa PAD Kabupaten Bangka Tengah yang di peroleh BPPRD Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari efektivitas peningkatan tersebut belum efektif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut

dikarenakan pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 realisasi PAD sudah mencapai target yaitu sebesar 108,09 persen dan 103,59 persen, sedangkan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 realisasi PAD belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2016 merupakan periode capaian realisasi PAD terendah sebesar 76,74 persen. Penurunan tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Bangka Tengah disebabkan oleh belum efektifnya penerimaan sumber PAD seperti lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDD), pajak & retribusi daerah. Kondisi ini menjelaskan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih giat dalam proses memaksimalkan potensi PAD tersebut.

Target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Bangka Tengah yang telah ditetapkan oleh BPPRD dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 adalah:

**Tabel I.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013- 2017**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2013	Rp.15.232.000.000	Rp.18.440.371.272	121,06
2014	Rp.23.430.000.000	Rp.27.046.327.130	115,43
2015	Rp.32.285.200.000	Rp.27.304.300.042	84,57
2016	Rp.43.505.020.000	Rp.32.257.175.656	74,15
2017	Rp.38.975.000.000	Rp.37.355.092.035	95,84

Sumber Laporan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, data diolah (2019)

Realisasi pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan Tabel I.2 tetapi apabila dilihat dari tingkat efektivitas pajak daerah belum dikatakan efektif, karena kurun waktu 3 tahun terakhir (Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017) realisasi pajak daerah yang diterima BPPRD belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2016 adalah tahun dengan efektivitas terendah yaitu sebesar 74,15 persen. Situasi tersebut dikarenakan pada Tahun 2016 penetapan target pajak daerah yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,

sedangkan Tahun 2013 dan Tahun 2014 realisasi pajak daerah telah tercapai bahkan melebihi dari target yang diharapkan, dan Tahun 2013 merupakan efektifitas pajak daerah tertinggi sebesar 121,06 persen.

Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah daerah sudah seharusnya berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat adalah pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Masyarakat merupakan anggota yang menjadi bagian dari daerah sebab proses pemungutan pajak daerah dapat menjadi beban pada masyarakat berdasarkan ketentuan pajak daerah. Ketentuan pajak daerah harus dipahami masyarakat dengan jelas sehingga bersedia dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Kumoro (2017) menjelaskan, pemungutan pajak daerah selalu berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi terhadap PAD dan laju pertumbuhan serta PAD merupakan indikator untuk mengukur kemandirian keuangan daerah.

Efektivitas adalah perbandingan pencapaian pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah terhadap target yang telah ditentukan (Mustoffa, 2018). Analisis efektivitas menurut Handoko (2013) merupakan analisis kemampuan pemerintah daerah yang digambarkan dengan perbandingan pencapaian PAD yang didapatkan dengan target yang telah ditentukan berdasarkan kemampuan riil daerah sehingga dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah yang baik dapat dianalisis melalui pencapaian rasio efektivitas yang tinggi. Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah selama Tahun 2013 hingga Tahun 2017 dikategorikan efektif dengan rata-rata 98,21 persen pertahun. Tingkat efektivitas pajak daerah tertinggi sebesar 121,06 persen yang terjadi pada Tahun 2013 dan

Tahun 2016 merupakan tingkat efektivitas pajak daerah terendah sebesar 74,15 persen.

Kontribusi diperlukan untuk menjelaskan seberapa besar peranan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD sehingga dapat memberikan tindakan maupun kebijakan yang jelas yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah guna meningkatkan kontribusi semua penerimaan daerah (Lamia, *et al*, 2015). Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 5 tahun dikategorikan baik dengan rata rata kontribusi sebesar 42,37 persen, hal ini dimaknai lebih dari 42,37 persen penerimaan PAD Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil yang diperoleh dari pajak daerah dan sisanya berasal dari retribusi, lain-lain PAD sah dan HPKDD. Tahun 2017 kontribusi pajak daerah sebesar 38,36 persen dan merupakan kontribusi terendah pajak daerah terhadap PAD, sedangkan kontribusi tertinggi yaitu pada Tahun 2013 sebesar 44,55 persen.

Halim dan Kusufi (2012) mengemukakan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah yaitu menilai seberapa besar kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan serta mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari satu kurun waktu tertentu ke kurun waktu berikutnya, sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Selama kurun waktu 5 tahun laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah mengalami fluktuatif dengan rata-rata sebesar 20,38 persen termasuk dalam kategori tidak berhasil.

Sejumlah penelitian empiris tentang efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD telah diteliti sebelumnya seperti yang

dilakukan oleh Aditya Ramadhan Sriparno, *et al* (2015), menyimpulkan bahwa pajak daerah kota Denpasar adalah faktor pendapatan utama dalam PAD dengan rata-rata kontribusi per tahun 72 persen dan efektivitasnya dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 121,45 persen selama 5 tahun dan kemandirian Kota Denpasar selama periode tahun 2009-2013 adalah 64 persen dengan kriteria sangat baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian Jumingan dan Kasidin (2017), menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan PAD.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sofia Dwi Yuliani, *et al* (2015) dengan hasil penelitian bahwa pada periode Tahun 2009 sampai Tahun 2013 menjelaskan laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran dengan rata-rata 25,73 persen sedangkan rata-rata pajak daerah 50,27 persen dan rata-rata kontribusi sebesar 21,22 persen dengan kriteria cukup. Peningkatan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan Dispenda melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan sejumlah penelitian yang telah diteliti sebelumnya maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang sama terkait dengan pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah tetapi dengan variabel yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan mengetahui permasalahan Efektivitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta pengaruhnya terhadap PAD dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang masalah mengenai efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Daerah serta Pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah serta Pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tahun 2013 sampai Tahun 2017?
3. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017?
4. Bagaimana Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017?
5. Apakah Efektivitas Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Berpengaruh Secara Simultan terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah dapat terarah dan tidak terlalu luas sehingga dapat memberikan pemahaman yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada pembahasan Pajak Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur dari PAD.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan maka tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui efektivitas pajak daerah serta pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui kontribusi pajak daerah serta pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017.
3. Untuk menganalisa dan mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah serta pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017.
4. Untuk menganalisa dan mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017.
5. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh secara simultan efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak daerah dan laju pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 sampai Tahun 2017.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan khusus pada Kemandirian Keuangan Daerah dengan kajian Pajak Daerah dan PAD.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran serta masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam

peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan menggali dan meningkatkan potensi pajak daerah.

### 3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif masukan dan tambahan informasi berkenaan dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, efektivitas dan laju pertumbuhan pajak daerah dalam meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang mendasari dari analisis penelitian ini, seperti teori tentang pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah dan penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Bab ini juga mengemukakan kerangka pemikiran serta hipotesis dari penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi

operasional dan pengukuran variabel, teknik pengambilan data, jenis data dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV berisi pemaparan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis dan interpretasi data dan pembahasan hasil.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan penjelasan tentang gambaran hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan penulis sebagai bahan masukan pada instansi yang diteliti. Sedangkan kesimpulan dari hasil analisis sebagai pertimbangan manajemen instansi dan memperkaya konsep serta teori bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**